

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan

Desi Santa Claudia Br Ginting¹, Sri Rahayu¹, Rahayu¹

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Article History

Received : 8 Juli 2026
Revised : 18 Juli 2026
Accepted : 6 Agustus 2026
Published : 7 Agustus 2026

Corresponding author*:

Desi Santa Claudia Br Ginting

Contact:

desiginting452 @gmail.com

Cite This Article: (APA 6th)

Ginting, D. S. C. B. ., Sidabutar, R. C., & Tambunan, B. H. (2026). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 6(02), 8–17.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v6i02.3058>

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) in financial management at the Secretariat of the Medan City Regional House of Representatives (DPRD), identify supporting and inhibiting factors, and examine efforts to overcome implementation barriers. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through semi-structured interviews, direct observation, and documentation involving officials and staff engaged in financial management and SIPD operations. Data validity was ensured through source and technique triangulation, while data were analyzed using an interactive model consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that SIPD has been implemented across the financial management cycle, including planning, budgeting, administration, reporting, and accountability, and has improved data integration, administrative order, transaction traceability, reporting efficiency, transparency, and accountability. Its implementation is supported by government regulations, leadership commitment, employee competence, technological infrastructure, training, and inter-agency coordination, although several obstacles remain such as server disruptions, unstable internet connectivity, slow system access, system updates, user adaptation issues, and data-entry errors. These challenges are addressed through technical coordination, training, competency development, internal coordination, and periodic data verification. The study implies the need for strengthened technological infrastructure, continuous user training, and responsive technical support to optimize SIPD implementation, and contributes original empirical evidence showing that its effectiveness depends on the interaction between system quality, human resources, infrastructure readiness, and organizational support.*

Keywords: *Regional Government Information System; SIPD; Regional Financial Management; Financial Accountability; Local Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat serta staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan operasional SIPD. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah diimplementasikan dalam siklus pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta telah meningkatkan integrasi data, ketertiban administrasi, keterlacakan transaksi, efisiensi pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi SIPD didukung oleh regulasi pemerintah, komitmen pimpinan, kompetensi pegawai, infrastruktur teknologi, pelatihan, dan koordinasi antarinstansi, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan server, koneksi internet yang tidak stabil, akses sistem yang lambat, pembaruan sistem, adaptasi pengguna, dan kesalahan input data. Kendala tersebut diatasi melalui koordinasi teknis, pelatihan, pengembangan kompetensi, koordinasi internal, dan verifikasi data secara berkala. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan pengguna secara berkelanjutan, serta dukungan teknis yang responsif untuk mengoptimalkan implementasi SIPD, serta memberikan kontribusi empiris orisinal yang menunjukkan bahwa efektivitas SIPD bergantung pada interaksi antara kualitas sistem, sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan dukungan organisasi.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; SIPD; Pengelolaan Keuangan Daerah; Akuntabilitas Keuangan; Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan melalui sistem informasi yang lebih terpadu. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan daerah secara terintegrasi. Penerapan SIPD menjadi semakin penting karena pengelolaan keuangan daerah dituntut mampu memenuhi prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Secara regulatif, penerapan SIPD berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sedangkan pengelolaan keuangan daerah secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019, 2020). Dalam praktiknya, penerapan SIPD tidak hanya berfungsi sebagai digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen yang menghubungkan data keuangan antar-tahapan sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan keterlacakan informasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan operasional, seperti gangguan server, jaringan yang lambat, perubahan fitur, dan kebutuhan peningkatan kompetensi pengguna.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SIPD memberikan manfaat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas sistem, sumber daya manusia, dan dukungan organisasi. Nasution dan Nurwani (2021) menemukan bahwa penerapan SIPD pada BPKAD Kota Medan telah mendukung proses pengelolaan keuangan, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Pada konteks Sekretariat DPRD Kota Medan, Sijabat, Siringoringo, dan Simanjuntak (2024) menemukan adanya kendala berupa kebutuhan pelatihan pengguna, gangguan server, jaringan yang lambat, aplikasi yang mengalami kesalahan, serta beberapa menu sistem yang belum dapat digunakan secara optimal. Penelitian lain di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa penerapan SIPD dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (Wahyudi, Johannes, Sinurat, & Romarina, 2024). Sementara itu, Fitriani dan Solikhin (2025) menemukan bahwa implementasi SIPD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, tetapi hasil penerapannya masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan organisasi.

Kajian mengenai penerapan SIPD banyak menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena metode tersebut memungkinkan peneliti memahami secara langsung proses implementasi, pengalaman pengguna, serta faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan sistem. Sijabat et al. (2024) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen keuangan untuk menganalisis penerapan SIPD pada DPRD Kota Medan. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Wahyudi et al. (2024), yang memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan pendekatan tersebut relevan karena efektivitas penerapan SIPD tidak hanya dapat dilihat dari keluaran sistem, tetapi juga perlu dipahami melalui pengalaman pengguna, proses administrasi, kualitas layanan, dukungan organisasi, serta kendala teknis yang muncul selama implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi data, serta analisis interaktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan SIPD di Sekretariat DPRD Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan SIPD; serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan SIPD pada lingkungan Sekretariat DPRD yang memiliki karakteristik administrasi berbeda dengan BPKAD maupun organisasi perangkat daerah lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sistem informasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas penerapan SIPD agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap proses penerapan SIPD berdasarkan pengalaman dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi penerapan SIPD pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi sistem.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian dipilih karena Sekretariat DPRD Kota Medan telah menerapkan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan dan memiliki karakteristik administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kedewanan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada Maret hingga April 2026, yang mencakup kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Medan. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pegawai atau pejabat yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan dan/atau penggunaan SIPD serta memiliki pengetahuan mengenai proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Informan penelitian meliputi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, serta Bendahara Pengeluaran atau Operator SIPD. Pemilihan informan dari beberapa fungsi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari perspektif yang berbeda serta memungkinkan dilakukannya perbandingan informasi antar-informan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam serta hasil observasi terhadap proses penggunaan SIPD dalam aktivitas pengelolaan keuangan. Data primer difokuskan pada informasi mengenai penerapan SIPD pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, manfaat yang dirasakan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sistem.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang relevan dengan penelitian, meliputi dokumen administrasi dan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SIPD dan pengelolaan keuangan daerah, pedoman penggunaan SIPD, serta dokumen pendukung lainnya. Literatur dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung interpretasi dan pembahasan terhadap temuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi**. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pendekatan semi-terstruktur dipilih agar pertanyaan utama tetap sesuai dengan tujuan penelitian sekaligus memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, kendala, dan pandangannya mengenai penggunaan SIPD secara lebih mendalam.

Wawancara difokuskan pada penerapan SIPD dalam tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, wawancara digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan selama implementasi SIPD.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggunaan SIPD dalam aktivitas pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Medan. Observasi diarahkan pada proses penginputan dan pengelolaan data, penggunaan sistem dalam mendukung kegiatan administrasi keuangan, serta kondisi yang berpotensi mendukung atau menghambat pelaksanaan SIPD.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan meliputi laporan dan dokumen administrasi keuangan yang relevan, pedoman SIPD, regulasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan silang terhadap informasi yang diperoleh.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda dalam proses pengelolaan keuangan. Informasi mengenai penerapan SIPD yang diperoleh dari satu informan dibandingkan dengan keterangan informan lainnya untuk mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan informasi.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Informasi yang disampaikan oleh informan diperiksa kembali melalui pengamatan terhadap proses penggunaan SIPD dan dokumen pendukung yang relevan. Prosedur tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data.

Selain kredibilitas, kualitas penelitian dijaga melalui aspek transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Transferabilitas dilakukan dengan memberikan deskripsi yang memadai mengenai konteks penelitian sehingga pembaca dapat mempertimbangkan relevansi temuan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dependabilitas dilakukan melalui dokumentasi proses penelitian secara sistematis, sedangkan konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa interpretasi dan kesimpulan penelitian didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Proses analisis dilakukan secara interaktif sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan penelitian.

Pada tahap kondensasi data, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, disederhanakan, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan ke dalam tema utama, yaitu penerapan SIPD pada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; faktor pendukung; faktor penghambat; serta upaya mengatasi hambatan penerapan SIPD.

Pada tahap penyajian data, hasil kategorisasi disusun dalam bentuk uraian naratif dan tabel ringkasan sehingga hubungan antartemuan dapat diidentifikasi secara sistematis. Penyajian tersebut digunakan untuk melihat pola, persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antara penerapan SIPD dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan pola dan tema yang ditemukan selama proses analisis. Temuan kemudian diverifikasi melalui perbandingan antar-informan serta pemeriksaan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang memadai dan konsisten dengan data penelitian.

Secara keseluruhan, proses penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penetapan fokus penelitian, pemilihan informan, pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, analisis dan kategorisasi data, interpretasi temuan, serta penarikan kesimpulan. Prosedur tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Medan dan digunakan secara terintegrasi pada seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Implementasi tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan keterpaduan data, ketertiban administrasi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, SIPD berfungsi sebagai sistem integrasi data keuangan yang menghubungkan seluruh proses pengelolaan anggaran dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, data tidak lagi dikelola secara terpisah antarbagian sehingga proses koordinasi menjadi lebih efektif dan risiko inkonsistensi data dapat diminimalkan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas jaringan internet, serta penyesuaian pengguna terhadap pembaruan aplikasi.

Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, SIPD digunakan untuk menginput program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran perangkat daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan sistem ini memungkinkan seluruh usulan kegiatan dan anggaran dihimpun dalam satu basis data sehingga proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Integrasi tersebut memberikan kemudahan dalam proses koordinasi antarbagian dan verifikasi usulan sebelum memasuki tahap penganggaran. Data yang telah dimasukkan dapat digunakan sebagai dasar untuk proses berikutnya sehingga potensi terjadinya ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan anggaran dapat diminimalkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD memberikan manfaat dalam meningkatkan konsistensi data dan tertib administrasi pada tahap perencanaan. Namun, gangguan sistem yang terjadi pada waktu tertentu dapat menyebabkan proses penginputan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat integrasi data melalui SIPD masih sangat bergantung pada kualitas dan stabilitas sistem.

Tahap Penganggaran

Pada tahap penganggaran, SIPD digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Seluruh data anggaran dimasukkan melalui sistem sehingga proses penyusunan, verifikasi, dan koordinasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Penggunaan SIPD pada tahap ini memberikan manfaat terhadap peningkatan transparansi karena proses penganggaran terdokumentasi secara elektronik dan dapat ditelusuri kembali. Sistem juga mendukung akuntabilitas karena informasi mengenai program, kegiatan, dan alokasi anggaran tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran masih menghadapi kendala berupa jaringan internet yang kurang stabil, proses loading yang relatif lama pada waktu tertentu, serta perubahan fitur akibat pembaruan aplikasi. Hambatan tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian dokumen, terutama ketika terjadi pada periode dengan intensitas penggunaan sistem yang tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas SIPD pada tahap penganggaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem dalam mengintegrasikan data, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional sistem.

Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, SIPD digunakan untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan, termasuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), pencatatan transaksi, serta pengelolaan dokumen administrasi keuangan.

Integrasi sistem memberikan manfaat dalam meningkatkan ketertiban administrasi karena seluruh transaksi dapat terdokumentasi secara elektronik dan ditelusuri kembali apabila diperlukan. Penggunaan satu sistem juga mengurangi kebutuhan pencatatan berulang dan mendukung proses monitoring terhadap transaksi yang telah dilakukan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SIPD pada tahap penatausahaan tetap dipengaruhi oleh ketelitian pengguna. Kesalahan dalam penginputan data dapat menyebabkan proses koreksi membutuhkan waktu tambahan karena perubahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pengguna perlu terus menyesuaikan diri dengan pembaruan fitur sistem.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia yang menggunakan sistem. Dengan demikian, peningkatan kemampuan operator melalui pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data keuangan.

Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, SIPD memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan karena data yang berasal dari tahap penganggaran dan penatausahaan telah terintegrasi dalam sistem. Kondisi tersebut membantu proses penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya secara lebih sistematis.

Integrasi data juga mempermudah proses rekonsiliasi dan penyampaian laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan tersedianya data pada satu sistem, proses penghimpunan informasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan risiko terjadinya duplikasi data dapat dikurangi.

Meskipun demikian, penggunaan SIPD tidak menghilangkan kebutuhan terhadap proses verifikasi. Pengguna tetap harus memastikan kesesuaian data sebelum laporan disampaikan, terutama ketika terdapat perubahan atau koreksi transaksi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa SIPD berperan sebagai instrumen pendukung peningkatan efisiensi pelaporan, sedangkan akurasi akhir laporan tetap dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam melakukan pemeriksaan dan validasi data.

Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, SIPD digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban karena seluruh transaksi keuangan telah tersimpan dan terdokumentasi dalam sistem. Kondisi tersebut mempermudah proses rekonsiliasi dan pemeriksaan karena informasi transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

Penyimpanan data secara elektronik juga mendukung transparansi dan akuntabilitas karena setiap transaksi memiliki rekam informasi yang dapat digunakan sebagai bukti administrasi. Dengan demikian, SIPD tidak hanya mempermudah penyusunan dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga meningkatkan keterlacakan transaksi keuangan.

Namun, efektivitas pada tahap ini sangat bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian data yang dimasukkan ke dalam sistem. Oleh karena itu, pengguna tetap perlu memastikan kesesuaian antara data elektronik dan dokumen pendukung agar tidak terjadi perbedaan pada saat rekonsiliasi atau pemeriksaan.

Faktor Pendukung Penerapan SIPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SIPD di Sekretariat DPRD Kota Medan didukung oleh regulasi pemerintah, komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi, serta koordinasi dengan BPKAD.

Dukungan regulasi menjadi faktor penting karena penggunaan SIPD telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan informasi pemerintahan daerah. Keberadaan regulasi memberikan dasar bagi perangkat daerah untuk menggunakan sistem yang sama sehingga proses pengelolaan data keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Selain regulasi, komitmen pimpinan juga berperan dalam keberhasilan implementasi. Dukungan pimpinan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem dan mendorong pegawai untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja berbasis digital.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor pendukung berikutnya. Pengguna yang memiliki pemahaman memadai terhadap fitur dan prosedur SIPD akan lebih mampu mengelola data secara tepat dan mengurangi risiko kesalahan. Oleh karena itu, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pengguna.

Ketersediaan komputer, jaringan internet, serta dukungan teknis dari BPKAD juga membantu keberlangsungan operasional SIPD. Ketika terjadi kendala, koordinasi dengan admin sistem atau BPKAD memungkinkan permasalahan ditangani dengan lebih cepat.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD bukan hanya merupakan hasil dari kualitas teknologi, tetapi merupakan interaksi antara sistem, sumber daya manusia, dukungan pimpinan, infrastruktur, dan koordinasi organisasi.

Faktor Penghambat Penerapan SIPD

Di samping faktor pendukung, penelitian menemukan sejumlah hambatan yang masih memengaruhi efektivitas penggunaan SIPD. Hambatan tersebut meliputi gangguan server, ketidakstabilan jaringan internet, proses akses yang lambat, pembaruan aplikasi, kebutuhan adaptasi pengguna, tingginya volume pekerjaan, serta kesalahan penginputan data.

Gangguan server menjadi kendala yang cukup penting, terutama ketika terjadi mendekati batas waktu penyampaian laporan. Ketika sistem tidak dapat diakses secara optimal, proses input dan verifikasi menjadi tertunda sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Kualitas jaringan internet juga menjadi faktor yang menentukan karena SIPD membutuhkan konektivitas yang stabil. Jaringan yang tidak stabil menyebabkan akses sistem menjadi lambat dan mengurangi efisiensi proses administrasi.

Selain kendala teknis, pembaruan aplikasi juga menimbulkan kebutuhan adaptasi. Perubahan fitur atau prosedur penggunaan mengharuskan pegawai melakukan penyesuaian kembali. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan apabila tidak disertai sosialisasi dan pendampingan yang memadai.

Kesalahan penginputan data juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dalam pengelolaan keuangan, kesalahan pada tahap awal dapat memengaruhi proses berikutnya dan membutuhkan prosedur koreksi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil yang dihasilkan SIPD tetap bergantung pada ketelitian dan kompetensi pengguna.

Dengan demikian, hambatan implementasi SIPD dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu hambatan teknis yang berkaitan dengan sistem dan infrastruktur, serta hambatan operasional yang berkaitan dengan kompetensi, adaptasi, dan ketelitian pengguna.

Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan SIPD

Sekretariat DPRD Kota Medan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan SIPD. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan BPKAD dan Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, peningkatan kompetensi pegawai, penguatan koordinasi antarbagian, serta pelaksanaan pengecekan dan verifikasi data secara berkala.

Koordinasi dengan BPKAD menjadi salah satu langkah utama dalam menangani kendala teknis. Ketika terjadi gangguan sistem atau kesulitan dalam proses koreksi data, pegawai melakukan komunikasi dengan admin SIPD atau pihak BPKAD untuk memperoleh arahan penyelesaian.

Pelatihan dan bimbingan teknis juga menjadi strategi penting, khususnya ketika terdapat pembaruan aplikasi. Melalui kegiatan tersebut, pengguna dapat memahami perubahan fitur dan mekanisme sistem sehingga proses adaptasi dapat berlangsung lebih cepat.

Selain peningkatan kapasitas pengguna, verifikasi data dilakukan sebelum penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian antara data pada sistem dan dokumen pendukung.

Penguatan koordinasi internal juga diperlukan karena data yang digunakan pada satu tahap akan menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Oleh karena itu, konsistensi dan kelengkapan data perlu dijaga sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi SIPD memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyempurnaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manusia dan koordinasi organisasi.

Pembahasan Efektivitas Penerapan SIPD

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi SIPD telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Medan. Kontribusi tersebut terlihat dari terintegrasinya data antar-tahapan, peningkatan ketertiban administrasi, kemudahan penelusuran transaksi, efisiensi penyusunan dokumen, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, keberhasilan sistem dapat ditinjau melalui kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (net benefits). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah menghasilkan manfaat organisasional melalui integrasi data dan peningkatan efisiensi proses. Hal tersebut menunjukkan adanya net benefits dari penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan.

Dari aspek system quality, SIPD memiliki kemampuan mengintegrasikan data mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun, gangguan server, jaringan internet yang tidak stabil, dan proses akses yang lambat menunjukkan bahwa kualitas teknis sistem masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki. Artinya, keberhasilan implementasi SIPD belum sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh keandalan sistem ketika digunakan dalam aktivitas operasional.

Dari aspek information quality, integrasi data membantu menghasilkan informasi keuangan yang lebih konsisten, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Hal ini sangat penting dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban karena informasi yang dihasilkan harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Akan tetapi, kualitas informasi masih bergantung pada ketelitian pengguna ketika memasukkan dan memverifikasi data.

Dari aspek service quality, keberadaan dukungan teknis melalui koordinasi dengan BPKAD, sosialisasi, dan bimbingan teknis membantu pengguna dalam mengatasi kendala penggunaan sistem. Dukungan tersebut menjadi penting ketika terjadi perubahan fitur atau gangguan teknis yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiani dan Isnawaty yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan koordinasi antarperangkat daerah, tetapi masih menghadapi kendala berupa gangguan server dan penyesuaian terhadap sistem. Temuan mengenai peningkatan transparansi dan akurasi data juga sejalan dengan hasil penelitian Hasanah et al., sedangkan hambatan berupa kemampuan pengguna, adaptasi terhadap pembaruan sistem, dan kendala teknis memperkuat hasil penelitian Jauhari.

Kesamaan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan teknis dan kompetensi pengguna masih menjadi isu yang relatif konsisten dalam implementasi SIPD. Namun, penelitian ini memberikan konteks tambahan pada lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Karakteristik administrasi Sekretariat DPRD yang mendukung kegiatan kedewanan membutuhkan koordinasi antarbagian dan ketepatan data yang tinggi sehingga integrasi sistem menjadi aspek penting dalam menjaga kesinambungan proses pengelolaan keuangan.

Secara konseptual, efektivitas penerapan SIPD dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tiga aspek. Pertama, efektivitas proses, yang tercermin dari semakin terstrukturanya proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kedua, efektivitas informasi, yang terlihat dari integrasi, konsistensi, dan keterlacakan data keuangan. Ketiga, efektivitas tata kelola, yang tercermin dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat kondisional karena sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem, stabilitas jaringan, kompetensi pengguna, dan dukungan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan

kualitas infrastruktur teknologi informasi perlu disertai dengan penguatan kompetensi pengguna melalui pelatihan berkelanjutan serta mekanisme koordinasi dan pendampingan teknis yang responsif.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa SIPD tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen integrasi dan pengendalian informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika didukung oleh sistem yang stabil, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan koordinasi organisasi yang baik, SIPD dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Brand Ambassador dan Brand Image terhadap keputusan pembelian Fore Coffee di Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa Brand Ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan figur publik yang memiliki popularitas, kredibilitas, daya tarik, dan kemampuan memengaruhi konsumen dapat meningkatkan ketertarikan serta keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian produk Fore Coffee.

Brand Image juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh Brand Image lebih dominan dibandingkan Brand Ambassador, yang menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas produk, reputasi merek, kepercayaan terhadap merek, dan daya tarik merek menjadi pertimbangan yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Hasil regresi menunjukkan koefisien Brand Image sebesar 0,473, lebih besar dibandingkan Brand Ambassador sebesar 0,197.

Secara simultan, Brand Ambassador dan Brand Image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Fore Coffee di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, keberhasilan strategi pemasaran Fore Coffee tidak hanya ditentukan oleh pemilihan figur publik sebagai representasi merek, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mempertahankan citra merek yang positif dan konsisten di benak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Kurniawan, D. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 14(2), 87–98.
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(5), 1548–1561. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sijabat, J., Siringoringo, M. J. B., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada Kantor DPRD Kota. *Jurnal Mirai Management*, 9(1). <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i1.7402>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11(1), 27–38. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>

Winarno, W. W. (2017). *Sistem informasi manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.